



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS INDONESIA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARI FAHRIAL SYAM**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **643414**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 10.717.735.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/499 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 6.305.880.000
2. Bangunan Seluas 37 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 679.338.000
3. Bangunan Seluas 36 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 918.963.000
4. Bangunan Seluas 46 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 507.824.000
5. Bangunan Seluas 38 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 317.125.000
6. Bangunan Seluas 45 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 672.435.000
7. Bangunan Seluas 38 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 316.170.000
8. Bangunan Seluas 40.35 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 1.479.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS/SEDAN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 154.000.000
2. MOBIL, NISSAN THEANA/SEDAN Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 386.000.000



3. MOBIL, TOYOTA YARIS/SEDAN Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
117.000.000
4. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
822.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 6.828.740.218

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.532.257.800

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 20.558.233.018

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 20.558.233.018

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.